



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SAIFUL ALAMSYAH
2. Jabatan : PANITERA
3. NHK : 426550

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 809.500.000

1. Tanah Seluas 11543 m2 di BATU BARA, HASIL SENDIRI Rp. 147.000.000
2. Tanah Seluas 112 m2 di ASAHAN, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000
3. Tanah Seluas 300 m2 di DELI SERDANG, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 210 m2/112 m2 di SERDANG BEDAGAI, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000
5. Tanah Seluas 693 m2 di SERDANG BEDAGAI, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 175 m2/140 m2 di DELI SERDANG, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
7. Tanah Seluas 1240 m2 di BATU BARA, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 62.000.000

1. MOTOR, HONDA PCX 150 CC Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 23.000.000
2. MOTOR, HONDA F1C02N46L0 A/T Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000
3. MOTOR, HONDA L1K02Q33L1 A/T Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 22.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 479.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 41.377.009



F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 1.391.877.009

III. HUTANG

Rp. 969.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 422.877.009

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

Penyampaian SPT Elektronik

❖ Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : SAIFUL ALAMSYAH

NPWP : 575565072115000

Tahun Pajak : 2023

Masa Pajak : -/-

Jenis SPT : 1770S

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Nihil

Nominal : 0

Tanggal Penyampaian : 08/01/2024

Nomor Tanda Terima Elektronik :

140721063642475082221

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.